Hadi Tjahjanto Santer Disebut Bakal Ditunjuk Menjadi Menko Polhukam

JAKARTA (IM) - Sosok pengganti Mahfud MD untuk menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam (Menko Polhukam), santer disebut Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto, yang kini menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR).

"Isu burungnya demikian (Hadi Tjahjanto ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Menko Polhukam)" Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni, saat dihubungi wartawan, Selasa (20/2).

Sahroni pun merasa pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat tepat bila Hadi ditunjuk menjadi Menko Polhukam.

"Kalau benar maka pilihan presiden sangat tepat," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Hal itu menyusul langkah Jokowi yang menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberhentian dengan hormat Mahfud MD sebagai Menko Polhukam hari ini, Jumat 2 Februari 2024.

"Pada hari ini, Jumat, 2 Februari 2024, Presiden telah menandatangani Keppres No 20/P Tahun 2024, yang berisi pemberhentian dengan hormat Bapak Mahfud MD sebagai Menkopolhukam," kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana dalam keterangannya, Jumat 2 Februari 2024. ● **han**

Presiden Jokowi Disebut Segera Sahkan Perpres "Publisher Rights"

JAKARTA (IM) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengesahkan peraturan soal *publisher rights* dalam waktu dekat.

"Insya Allah sebentar lagi kita akan menyambut disahkannya regulasi ini oleh Bapak Presiden Republik Indonesia," ujar Budi Arie, dikutip dari siaran pers Kemenkominfo, Selasa (20/2).

Regulasi dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) itu ditujukan untuk menciptakan kesempatan yang sama bagi pelaku industri pers nasional dengan perusahaan platform digital. Langkah ini merupakan upaya memastikan pelaku industri media tidak tergerus oleh disrupsi digital.

Kemudian, berkaitan dengan masa transisi selama enam bulan setelah pengesahan regulasi *publisher rights*, Budi Arie meminta agar komite dan proses bisnis yang akan dijalankan dapat terbentuk dalam waktu tersebut.

"Saya merasa enam bulan bukan waktu yang lama, sehingga harus betul-betul bekerja cepat dan tepat," ucap Budi Arie.

Sebenarnya, Perpres *publisher rights* sudah diwacanakan sejak tiga tahun lalu. Saat menghadiri puncak Hari Pers Nasional 2023 di Sumatera Utara tahun lalu, Presiden Jokowi meminta agar aturan tersebut diselesaikan dalam waktu satu bulan.

Perpres *publisher rights* bukan mewajibkan platform memberikan uang kepada media. Melainkan untuk bekerja sama atau bernegosiasi dalam bisnis. ● **mei**

FOTO : ANT

PEMERIKSAAN SISKA WATI SEBAGAI TERSANGKA
Tersangka dugaan korupsi oleh penyelenggara negara berupa pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/2). Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah Kab. Sidoarjo tersebut diperiksa sebagai tersangka.

Pasukan Tempur Dikirim ke Yahukimo Pascapenembakan Pesawat Wings Air

JAKARTA (IM) - Bandara Nop Goliath Dekai masih dalam pengawasan dan pengamanan ketat pasukan TNI-Polri, pascapenembakan pesawat Wings Air, di Bandara Nop Goliath Dekai Yahukimo oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Teroris di wilayah Yahukimo.

Demikian diutarakan Pangkogabwilhan III Letjen TNI Richard T.H Tampubolon, melalui Kapen Kogabwilhan III Kolonel Czi Gusti Nyoman Suriastawa.

"Bahwa di Bandara Nop Goliath Dekai Yahukimo telah dilaksanakan penerbangan Pesawat Hercules C-130 Skadron Udara 32, A - 1316 yang melaksanakan misi kemanusiaan yakni mendorong logistik untuk Satuan Tugas (Satgas) TNI di Yahukimo serta untuk kebutuhan hidup masyarakat setempat," ujar Suriastawa kepada wartawan, Selasa (20/2).

"Telah dilaksanakan penerbangan Pesawat Hercules untuk misi kemanusiaan dengan membawa logistik untuk TNI dan juga untuk masyarakat yang ada di Yahukimo," ujarnya.

Bandara Dekai merupakan urat nadi transportasi ke Yahukimo. Oleh karena itu keberadaan bandara tersebut dinilai sangat vital.

"Kasihan masyarakat kalau tidak ada pesawat yang terbang ke Dekai karena gangguan keamanan bandara oleh KSTP," ujar Kolonel Suriastawa.

"Pimpinan TNI telah memberikan arahan demi membantu kesulitan masyarakat terkait suplai logistik ke Yahukimo, pengamanan bandara juga ditingkatkan setelah tejadinya insiden kemarin," lanjutnya.

Kapen juga menjelaskan bahwa saat ini pasukan TNI tetap bersiaga dan terus melaksanakan pengejaran terhadap Kelompok KKB Yahukimo yang telah mencoba membuat gangguan keamanan di Bandara Nop Goliath.

"Kita sudah siagakan pasukan di Bandara, disamping pasukan yang melakukan pengejaran terhadap KSTP tersebut," tandasnya.

Seperti diketahui, sebelumnya di Bandara Nop Goliath Dekai, Yahukimo telah terjadi insiden penembakan terhadap pesawat maskapai Wings Air oleh Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP) wilayah Yahukimo, namun dalam insiden tersebut tidak ada korban jiwa. ● **mei**

FOTO: ANTARA

TIM HUKUM NASIONAL AMIN BAHAS KECURANGAN PEMILU
Pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bersama Ketua Tim Hukum Nasional AMIN Ari Yusuf Amir serta Kapten Timnas AMIN Muhammad Syaugi memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di Markas Tim Hukum AMIN, Mampang Square, Jakarta Selatan, Selasa (20/2). Rapat tersebut membahas sejumlah kecurangan yang ditemukan Tim Hukum Nasional AMIN pada Pemilu 2024 dan mempersiapkan langkah hukum atas dugaan kecurangan tersebut termasuk kemungkinan insiatif hak angket di Parlemen.

Korupsi Izin Tambang Timah Menimbulkan Kerugian Lingkungan hingga Rp271 Triliun

Total luas galian terkait kasus PT Timah Tbk di Bangka Belitung sekitar 170.363.064 hektar. Padahal, yang memiliki IUP hanya 88.900,462 hektar.

JAKARTA (IM) - Kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022, turut menyebabkan kerugian lingkungan hingga Rp271.069.688.018.700 atau Rp271 triliun.

Hal ini diungkap Ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Hero Saharjo, saat memaparkan kerugian kerusakan hutan di Bangka Belitung (Babel), akibat kasus korupsi tersebut. Jumlah itu merupakan perhitungan kerugian kerusakan lingkungan dalam kawasan hutan dan nonkawasan hutan.

"Di kawasan hutan sendiri kerugian lingkungan ekologisnya itu Rp157,83 T, ekonomi lingkungannya Rp60,276 T, pemulihannnya itu Rp5,257 T. Totalnya saja untuk yang dikawasan hutan itu adalah Rp223.366.246.027.050," kata Bambang saat konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, dikutip Selasa (20/2).

"Dan kemudian yang nonkawasan hutan biaya kerugian ekologisnya 25,87 Triliun dan kerugian ekonomi lingkungannya 15,2 T dan biaya pemulihan lingkungan itu adalah 6,629 T. Jadi total untuk untuk yang (nonkawasan hutan APL) adalah 47,703 Triliun," ujarnya menambahkan.

Dijelaskan, total luas galian terkait kasus PT Timah Tbk di Bangka Belitung sekitar 170.363.064 hektar. Padahal, luas galian yang memiliki izin usaha tambang atau IUP hanya 88.900,462 hektar. "Dan dari luasan yang 170 ribu (hektar) ini ternyata yang memiliki IUP itu hanya 88.900,661 hektar, dan yang non IUP itu 81.462,602 hektar," ucapnya.

Perhitungan itu merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

"Kami menghitung berdasarkan permen LH Nomor 7 Tahun 2014," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung, Kuntadi mengatakan, angka kerugian kerusakan lingkungan hidup ini berbeda dengan kerugian keuangan negara.

"Kerugian ini masih akan kita tambah dengan kerugian keuangan negara yang sampai saat ini masih berproses. Berapa hasilnya masih kita tunggu," katanya.

Sebagai informasi, Kejagung telah menetapkan 11 tersangka dalam kasus korupsi tersebut. Satu di antaranya terkait dugaan perintangan penyidikan atau *obstruction of justice*. Berikut rinciannya:

SG alias AW selaku Pengusaha Tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. MBG, selaku Pengusaha Tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian, HT alias ASN selaku Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik Tersangka TN alias AN).

Berikutnya, MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk tahun 2016-2021. EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk tahun 2017-2018. BY selaku Mantan Komisaris CV VIP, RI selaku Direktur Utama PT SBS, TN selaku beneficial ownership CV VIP dan PT MCN, AA selaku Manajer Operasional tambang CV VIP, TT, Tersangka perintangan penyidikan perkara, dan RL, General Manager PT TINS. ● **han**

Tak Punya Gen Oposisi, PKB Diprediksi Bergabung dalam Koalisi Prabowo-Gibran

JAKARTA (IM) - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diprediksi bergabung dalam koalisi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, peraih suara tertiggi pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 menurut *quick count* atau hitung cepat berbagai lembaga survei.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam mengatakan, partai politik (parpol) yang dipimpin Muhaimin Iskandar, tak punya sejarah sebagai oposisi pemerintah.

"PKB tidak punya gen oposisi. Rasa-rasanya PKB tidak siap dengan konsekuensi untuk berhadap-hadapan dengan kekuasaan," kata Umam kepada wartawan, Senin (19/2).

Umam menduga, PKB tak siap jika harus berhadapan dengan pemerintah yang berkuasa. Sebab, hal itu akan berdampak pada aliran logistik dan stabilitas internal partai. Tak hanya itu, posisi Muhaimin di kursi pimpinan tertinggi PKB juga berpotensi terancam oleh "operasi" gabungan internal dan eksternal yang mungkin mendongkelnya dari posisi ketua umum.

Namun, jika PKB bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran yang mengusung semangat keberlanjutan pemerintahan Jokowi, jargon perubahan yang diusung Muhaimin bersama Anies Baswedan dan partai-partai pengusung keduanya pada Pilpres 2024 menjadi sia-sia.

"PKB sendiri intens menggunakan 'slepet'-nya untuk menghantam kredibilitas pemerintah dan Jokowi secara personal," ujar Umam.

Umam menilai, situasi politik pasca Pemilu 2024 merupakan ujian terhadap konsistensi partai-partai politik yang selama ini mengkritisi pemerintah dan menyerukan gerakan perubahan.

Bukan hanya PKB, Partai Nasdem juga akan dipandang tak konsisten jika pada akhirnya merapat ke pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebab, selama masa kampanye Pemilu 2024, kubu Anies-Muhaimin yang disokong oleh Nasdem, PKB, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat, yang banyak menyerang kubu Prabowo-Gibran sekaligus pemerintahan Jokowi. ● **mei**

FOTO : ANT

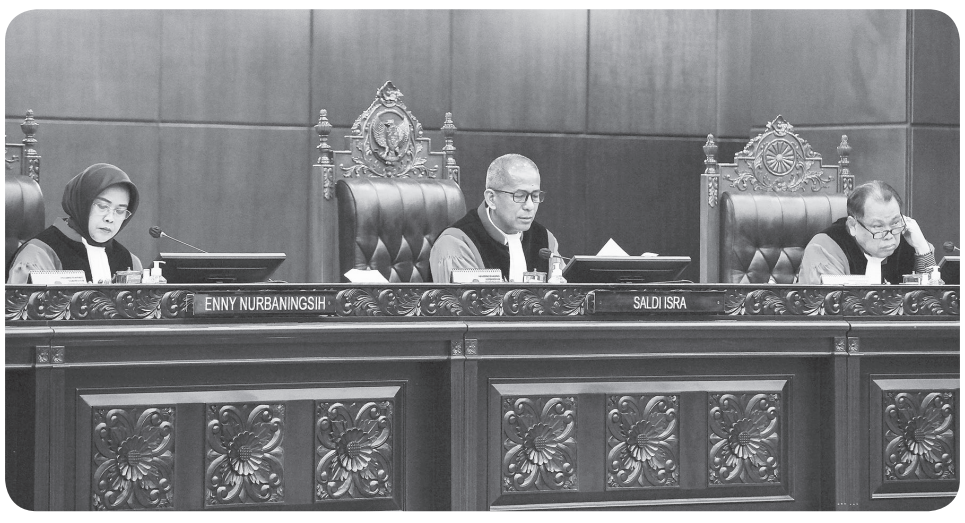

SIDANG PENGUJIAN MATERIIL UU TENTANG PEMILIHAN UMUM
Hakim Konstitusi Saldi Isra (tengah), Enny Nurbaningsih (kiri), dan Arief Hidayat (kanan) memimpin sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (20/2). Sidang perdana atas permohonan yang diajukan Fathul Hadie dan Afkar Rara tersebut beragenda pemeriksaan pendahuluan.

Beredar Susunan Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran, TKN: Semua Hoaks

JAKARTA (IM) - Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Fanta (Pemilih Muda) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Rahayu Saraswati menyatakan, susunan kabinet menteri Prabowo-Gibran yang beredar di media sosial, semuanya hoaks.

Sara—panggilan Saraswati-- menjelaskan, bocoran-bocoran yang beredar biasanya hanya berdasarkan asumsi.

"Semua bocoran kabinet dari pengalaman kita semua itu biasanya hoax. Kenapa? Karena ini biasanya asumsi dan prediksi orang," ujar Sara saat konfirmasi, Selasa (20/2).

Sara yang namanya juga masuk dalam bocoran susunan kabinet itu mengakui, prediksinya bisa salah dan bisa benar. Namun, berdasarkan pengalaman yang ada, prediksi susunan kabinet pemerintahan selalu salah.

Lagipula, kata keponakan Prabowo tersebut, hasil resmi dari KPU terkait Pilpres 2024 masih belum keluar.

"Masih banyak teman-teman kita yang berjuang untuk memastikan suaranya aman untuk pemilihan legislatif. Kita fokus dulu lah langkah demi langkah," jelasnya.

Sara mengingatkan bahwa kubu Prabowo-Gibran terbuka terhadap siapapun. Adapun Prabowo memang menegaskan akan merangkul rival-rivalnya.

"Jangan lupa kita masih terbuka kepada siapa pun yang mau bergabung di pemerintahan ke depan. Pak Prabowo sudah tegaskan itu," imbuh Sara.

Diketahui, dalam foto yang beredar, terlihat sejumlah nama beserta foto orang-orang yang disebut akan mengisi posisi menteri, dewan pertimbangan presiden, hingga kepala staf.

Di jajaran dewan pertimbangan presiden ada nama Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sedangkan Nusron Wahid disebut menjabat Kepala Staf Presiden, Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Erick Thohir Menko Energi, Investasi, dan Lingkungan Hidup, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menko Polhukam.

Tidak hanya itu, ada pula nama-nama seperti Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, Rosan Roeslani Menteri Luar Negeri, Dr Terawan Menkes dan Badan Gizi, Ridwan Kamil Menteri PUPR, Grace Natalie Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Yusril Ihza Mahendra Menteri Hukum dan HAM, hingga Sjafrie Sjamsoeddin Menteri Pertahanan.

Selain mereka, masih ada puluhan nama lain di dalam struktur kabinet yang beredar tersebut. ● **han**

PENGUMUMAN PENGAMBILALIHAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan (8) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bersama ini diumumkan bahwa PT Bahari Ichlas Sejahtera (**"BIS"**) dan/atau afiliasinya dan/atau pihak lain yang ditunjuk berencana untuk melakukan pengambilalihan sebagian besar saham pada PT Vorteks Inti Nusa, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan (**"Perseroan"**) dari pemegang saham mayoritas Perseroan.

Pengambilalihan saham-saham sebagaimana dimaksud dalam pengumuman ini merupakan pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (7) UUPT. Sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (4) UUPT, bagi kreditor yang memiliki keberatan terkait dengan rencana pengambilalihan Perseroan sebagaimana disebut di atas, dapat mengajukan keberatan kepada Direksi Perseroan secara tertulis, disertai surat-surat pendukungnya dalam jangka waktu paling lambat 14 hari setelah tanggal pengumuman ini.

21 Februari 2024
Hormat kami,

Direksi PT Bahari Ichlas Sejahtera — **Direksi PT Vorteks Inti Nusa**

mandiri

PENAWARAN PENGALIHAN PIUTANG (*CESSIE*)

Bahwa dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah, PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. akan melakukan penjualan atau pengalihan piutang (*Cessie*) terhadap debitur sebagai berikut :

No.	Nama	Alamat	Jumlah Tagihan per Tgl. 20 Februari 2024	Agunan Kredit
1	PT. Anugrah Buminta	Jalan Ketapang Utara I No.14-A, Jakarta Pusat	Rp 573.022.095,00	Jalan Puri Kembangan Kedoya, Kelurahan Kedoya RT.007/02, Kecamatan Kebon Jeruk, Wilayah Jakarta Barat, DKI Jakarta

Apabila ada yang berminat dalam pengalihan kredit debitur di atas dapat menyampaikan penawaran secara tertulis ke alamat dibawah ini **paling lambat tanggal 27 Februari 2024, jam 10.00 WIB.**

PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.
Collection & Recovery Center Jakarta
Wisma Mandiri II Lt.17 Jl. Kebon Sirih No.83, Jakarta 10340

Demikian untuk diketahui semua pihak.

Jakarta, 21 Februari 2024
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.
Collection & Recovery Center Jakarta